



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT DIPLOMASI PUBLIK 2025-2029

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
Kementerian Luar Negeri



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Direktorat Diplomasi Publik menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Diplomasi Publik tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra merupakan salah satu perwujudan dan komitmen Direktorat Diplomasi Publik dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung Kementerian Luar Negeri mewujudkan Diplomasi *Soft Power* Indonesia dalam membangun citra positif Indonesia di dunia.

Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan diplomasi publik yang menjadi tanggung jawab Direktorat Diplomasi Publik dilaksanakan secara terarah, terukur dan selaras dengan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta arah kebijakan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, serta Kementerian Luar Negeri.

Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Direktorat Diplomasi Publik menetapkan visi:

“Menjadi Penjuru Penguatan Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Diplomasi Publik guna Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Diplomasi Publik mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan promosi aset-aset diplomasi *soft power* Indonesia;
2. Meningkatkan dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset *soft power* Indonesia;
3. Meningkatkan citra positif dan pengaruh Indonesia di dunia internasional melalui keikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan diplomasi publik

Akhir kata, kami mengharapkan dokumen ini dapat menjadi kompas transformasi dan landasan yang kokoh bagi Direktorat Diplomasi Publik dalam memperkuat peran Kementerian Luar Negeri sebagai aktor diplomasi publik yang relevan, progresif, dan berpengaruh di tingkat global.

Jakarta, 15 Januari 2026

Direktur Diplomasi Publik



Ani Nigeriawati



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum.....	1
I.2 Potensi dan Permasalahan	2
I.2.1 Potensi	2
I.2.2 Permasalahan dan Tantangan.....	5
I.2.3 Analisis SWOT	6
I.3 Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Diplomasi Publik 2020 – 2024.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	20
II.1 Visi	20
II.2 Misi Unit Organisasi	20
II.3 Tujuan Unit Organisasi.....	20
II.4 Sasaran Strategis Unit Organisasi.....	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	26
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	26
III.2 Kerangka Regulasi	31
III.3 Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
IV.1 Target Kinerja.....	34
IV.2 Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN.....	37
Matriks Strategi Direktorat Diplomasi Publik Tahun 2026-2029	
Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Diplomasi Publik Tahun 2025-2029	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 – Analisis SWOT	7
Tabel I.2 – Realisasi Indikator Indeks Citra Indonesia Tahun 2020-2024	10
Tabel II.1 – Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Direktorat Diplomasi Publik 2025-2029	24
Tabel III.1 – Matriks Mitigasi Risiko	28
Tabel IV.1 – Target Kinerja Direktorat Diplomasi Publik 2025-2029	34
Tabel IV.2 – Kerangka Pendanaan Direktorat Diplomasi Publik 2025-2029	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 – Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2020-2024	10
Gambar I.2 – Bali Democracy Forum ke-15	12
Gambar I.3 – Indonesia Channel 2023	13
Gambar I.4 – The 8 th Indonesia-Austria Interfaith and Intercultural Dialogue 2024	13
Gambar I.5 – Penandatanganan PKS Kemlu – Bank BNI dan Mandiri	14
Gambar I.6 – Kegiatan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2023-2024	15
Gambar I.7 – Harmony for the Pacific	16
Gambar I.8 – DDIS Indonesia – Bangladesh, 2024	17
Gambar I.9 – Peluncuran Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia	18
Gambar I.10 – Piagam Penghargaan Anugrah Purwakalagrha Indonesia Museum	18
Gambar III.1 – Bagan Struktur Organisasi Direktorat Diplomasi Publik	33
Gambar III.2 – Bagan Struktur Organisasi Museum KAA	33



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Dalam menjalankan politik luar negerinya selama periode 2020 - 2024, Indonesia memiliki prioritas 4+1 yang meliputi Penguatan Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Pelindungan, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia, serta Penguatan Infrastruktur Diplomasi.

Periode lima tahun terakhir ini membuka berbagai kesempatan dan tantangan baru bagi politik luar negeri Indonesia dengan adanya dinamika ekonomi dan politik pada tingkat domestik, regional, dan global. Dalam aspek ekonomi, periode dimaksud ditandai dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi.

Pandemi Covid-19 merubah kebiasaan pelaksanaan diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan alat *video conference*, pengembangan teknologi, dan meningkatnya peran media sosial menjadi sesuatu yang umum dan harus diikuti sehingga pelaksanaan diplomasi tidak tertinggal.

Tahun 2024 juga menjadi tahun historis politik yang ditandai dengan pemilu di lebih dari 50 negara dan melibatkan hampir setengah dari populasi dunia. Kondisi yang tidak kondusif dengan banyaknya disrupsi dan ketidakpastian ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia terus menjaga komitmennya untuk menjalankan Polugri Bebas Aktif, menghormati hukum internasional, dan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran dunia sesuai mandat konstitusi.

Indonesia memiliki modalitas dalam menavigasi tantangan dan mengisi defisit kepemimpinan pada tatanan global saat ini. Diplomasi Indonesia dijalankan secara *well-measured, well-calculated, action-oriented, result-oriented*; tetapi di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan dari Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang meneguhkan kesetaraan antar negara; membangkitkan solidaritas "*the Global South*"; menjadi embrio Gerakan Non-Blok; dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Peran *non-state actor* saat ini menjadi semakin krusial, termasuk penguatan *people-to-people connection* yang membumikan *habit of dialogue*. Indonesia dan global secara berkelanjutan menghadapi tantangan multidimensi, antara lain krisis *me-first policy*, gerakan populisme yang mematikan prinsip kemajemukan serta penghormatan HAM dan kemanusiaan, *trade war*, bias elite ekonomi dalam politik, dampak *artificial intelligence* (AI), isu sosial dan *sustainable development goals* (SDGs), dan lain-lain.



Oleh karena itu, diplomasi publik lahir karena kebutuhan memenangkan *hearts and minds* publik asing untuk mendukung kesuksesan diplomasi jalur tradisional. Diplomasi publik merupakan langkah diplomasi Pemerintah RI untuk dapat mengelola informasi dalam rangka promosi peningkatan citra positif Indonesia. Penggunaan diplomasi publik Indonesia dipandang penting untuk turut serta aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Bagi Indonesia, penguatan diplomasi *soft power* menjadi penting dalam konteks global yang berdaya saing, dinamis, dan terdigitalisasi. Berdasarkan laporan *Brand Finance* tahun 2024, *Global Soft Power Index* menempatkan Indonesia pada posisi ke-45 dari 193 negara. Peringkat ini menunjukkan potensi besar, sekaligus tantangan bagi daya saing dan pengaruh global Indonesia.

Tugas utama diplomasi publik adalah mengomunikasikan realitas mengenai Indonesia secara utuh baik ke dalam maupun ke luar negeri. Ke dalam membumikan politik luar negeri, ke publik asing membawakan *good news* dari Indonesia.

Untuk itu, berbagai upaya menghadirkan realitas Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim moderat, demokratis, dan modern, mulai dilakukan. Selain itu, juga dilakukan kegiatan yang menggambarkan kompatibilitas antara demokrasi dan Islam, serta menonjolkan kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan diplomasi publik tidak terlepas dari para pemangku kepentingan, antara lain masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, pemuda, pengusaha, *think-tank*, dan media. Selama ini peran serta para pemangku kepentingan tersebut telah diupayakan untuk dioptimalkan melalui penyertaan para pemangku kepentingan tersebut dalam berbagai kegiatan. Keterlibatan tersebut secara optimal turut mempengaruhi akuntabilitas publik yang diemban oleh Direktorat Diplomasi Publik sehingga penyertaan mereka dalam setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi publik, terdapat beberapa faktor yang menjadi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Diplomasi Publik.

I.2.1 Potensi

Kepemimpinan, Pengaruh, dan Citra Positif Indonesia

Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional juga memperlihatkan peningkatan. Indonesia menduduki peringkat 34 *Global*



Power Index dan peringkat 3 diantara negara ASEAN. Penguatan diplomasi *soft power* juga menjadi penting dalam konteks global yang berdaya saing, dinamis, dan terdigitalisasi. Berdasarkan laporan *Brand Finance* tahun 2024, *Global Soft Power Index* menempatkan Indonesia pada posisi ke-45 dari 193 negara. Di sisi lain postur pertahanan Indonesia juga terus meningkat dimana pemenuhan *Minimum Essential Force* mencapai 86,94% (2021) dan kontribusi industri pertahanan nasional terhadap pemenuhan kebutuhan alutsista tercatat sebesar 57,6% di tahun 2021.

Berdasarkan E-Government Development Index (EDGI) pada UN E-Government Survey tahun 2024, Indonesia telah meraih peringkat 64 dari 193 negara anggota PBB. Hasil tersebut membawa Indonesia naik 13 Peringkat dari tahun 2022 yang hanya mendapat peringkat 77.

Di tingkat kawasan, Indonesia berpotensi untuk terus menunjukkan kepemimpinannya di berbagai organisasi/forum regional. Untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika, penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia dapat diwujudkan antara lain dalam peningkatan ketahanan pangan, dukungan terhadap transisi energi bersih, dan pengembangan Small and Medium Enterprises (SME) dalam kerangka APEC, dan penanganan isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam kerangka IORA dengan diadopsinya IORA Principle Guidelines on Combating IUU Fishing pada pertemuan tingkat menteri IORA yang merupakan inisiatif Indonesia dan Prancis.

Merujuk kepada Asia Power Index 2024, Indonesia juga memiliki *diplomatic influence* terbesar di antara negara-negara kawasan dan terbesar keenam dari 27 negara indeks. Hal ini diukur melalui jumlah Perwakilan RI di seluruh dunia, pengaruh dan partisipasi di fora multilateral, serta performa kebijakan luar negeri.

Keterwakilan Indonesia sebagai tuan rumah APEC dalam 5-10 tahun ke depan juga berpotensi meningkatkan kepemimpinan Indonesia dan karenanya patut untuk dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa hampir semua ekonomi APEC telah menjadi tuan rumah APEC sebanyak 2 kali atau 3 kali. Sementara itu, Indonesia pernah menjadi ketua APEC pada tahun 1994 (menghasilkan Bogor Goals) dan tahun 2013. Kepemimpinan Indonesia pada forum regional akan membantu mendorong kemajuan posisi dasar nasional untuk pertumbuhan ekonomi dan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Peningkatan citra positif menjadi salah satu tujuan utama diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Citra positif berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia serta mendukung pencapaian kepentingan nasional di kancah global. Guna pengukuran citra tersebut, sejak tahun 2017 Ditjen IDP telah mengelola survei citra Indonesia di dunia internasional yang diselenggarakan oleh 128 Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (tidak termasuk perutusan tetap



untuk organisasi internasional) kepada Warga Negara Asing (WNA) dengan mengukur 3 (tiga) dimensi dan menghasilkan Indeks Citra Indonesia.

Pada tahun 2025, Indeks Citra Indonesia ditetapkan sebagai salah satu Indikator Pembangunan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025–2029, sehingga diperlukan penajaman metodologi dan perancangan survei yang lebih akurat dan representatif. Indeks ini juga menjadi alat ukur capaian Prioritas Diplomasi Asta Cita serta akan berperan sebagai instrumen pemetaan *soft power* Indonesia dan alat monitoring bagi *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia (GSDSP).

***Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia**

Di tengah dinamika global yang semakin berdaya saing, diplomasi *soft power* menjadi instrumen kunci dalam memperkuat citra positif, identitas nasional, dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Selama ini praktik diplomasi *soft power* sering berjalan sporadis tanpa kerangka terpadu. Sementara itu, tantangan seperti geopolitik dan geoekonomi yang dinamis, ketatnya kompetisi *nation branding* antarnegara, hingga meningkatnya tuntutan akan keberlanjutan, mendorong Indonesia untuk memiliki strategi yang jelas, terukur, dan terintegrasi.

Diplomasi pada hakikatnya merupakan seni dan praktik dalam mengelola hubungan luar negeri guna mencapai kepentingan nasional. Efektivitas diplomasi ditentukan oleh kemampuan negara memanfaatkan kekuatan (*power*), baik *hard power* maupun *soft power*. Diplomasi *soft power* merupakan praktik diplomasi yang bertumpu pada kemampuan negara untuk menyelaraskan kepentingan dan preferensi pihak lain melalui daya tarik tanpa paksaan. Efektivitas diplomasi *soft power* bergantung pada sejauh mana negara tersebut dipandang memiliki legitimasi dan citra yang kuat. Ketika Indonesia berhasil membangun legitimasi atau citra tersebut, masyarakat di negara sasaran akan lebih mudah menerima pengaruh serta kebijakan luar negerinya.

Grand Strategy Diplomasi *Soft Power* Indonesia memiliki misi untuk menjadikan diplomasi *soft power* sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi global Indonesia secara berkelanjutan, meningkatkan citra positif, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Dokumen *grand strategy* memberikan pedoman langkah-langkah efektif sehingga diplomasi *soft power* Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. *Grand strategy* ini akan merumuskan strategi, baik secara umum maupun spesifik untuk setiap kluster, dan berdasarkan periode waktu tertentu.

Aset-aset diplomasi *soft power* Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam 4 (empat) klaster yaitu: 1) politik dan nilai-nilai kebangsaan; 2) ekonomi dan pariwisata; 3) sosial budaya, dan 4) pendidikan, riset, dan inovasi. Masing-



masing klaster dirancang untuk saling memperkuat, dengan pendekatan berbasis kawasan yang disesuaikan dengan dinamika geopolitik dan kebutuhan spesifik tiap wilayah. Dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin, strategi ini mengedepankan diplomasi yang kontekstual dan relevan.

I.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah mengubah secara fundamental cara negara membangun citra, menyampaikan pesan, dan berinteraksi dengan publik global. Arus informasi yang serba cepat, real-time, dan lintas batas membuat diplomasi publik tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat satu arah dan birokratis. Platform digital memungkinkan siapa pun menjadi produsen informasi, sehingga narasi tentang Indonesia tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh individu, komunitas, influencer, dan aktor non-negara. Tantangan strategis yang muncul adalah bagaimana Direktorat Diplomasi Publik mampu beradaptasi dengan ekosistem komunikasi yang dinamis ini, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta membangun kapasitas pemantauan isu dan respons krisis secara digital agar tidak tertinggal dalam kontestasi narasi global.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas diplomasi publik, mulai dari analisis sentimen internasional, pemetaan opini publik, produksi konten, hingga personalisasi pesan bagi audiens global. Namun, AI juga menghadirkan risiko strategis, seperti penyebaran disinformasi berbasis deepfake, manipulasi opini publik, serta ketergantungan pada teknologi yang dapat menimbulkan persoalan etika, keamanan data, dan kedaulatan informasi. Direktorat Diplomasi Publik dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya memanfaatkan AI sebagai alat pendukung kebijakan dan komunikasi, tetapi juga menyusun kerangka tata kelola, standar etika, dan peningkatan kapasitas SDM agar pemanfaatan AI sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip diplomasi yang kredibel.

Selain itu, kebebasan berkomentar di media sosial memperkuat partisipasi publik dalam diplomasi, tetapi sekaligus memperbesar potensi munculnya ujaran kebencian, polarisasi, misinformasi, dan tekanan opini massa yang dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap negara. Ruang digital yang terbuka sering-kali menjadikan isu domestik dengan cepat bereskalasi menjadi perhatian global, bahkan sebelum negara sempat membangun narasi resminya. Tantangan bagi Direktorat Diplomasi Publik adalah menyeimbangkan prinsip kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga reputasi dan kepentingan nasional, melalui strategi komunikasi yang proaktif, dialogis, serta berbasis literasi digital, sehingga ruang



komentar tidak hanya menjadi sumber risiko, tetapi juga dapat dikelola sebagai kanal partisipasi publik yang konstruktif.

Postur Diplomasi yang Belum Memadai

Postur Diplomasi yang belum memadai menjadi salah satu permasalahan/tantangan antara lain jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan belum terimplementasikannya *Human Capital Management Plan* (HCMP) secara penuh; postur anggaran yang belum optimal; serta infrastruktur material dan nonmaterial lainnya. Selain itu juga terdapat tantangan berupa belum terintegrasinya manajemen risiko dan kinerja baik pada tataran fungsi substansi maupun tata kelola organisasi serta belum efektifnya pengendalian internal pada struktur dan proses yang telah dirancang.

Situasi Global yang Dinamis

Terlepas dari berbagai modalitas dimaksud, masih terdapat isu seperti ketegangan politik, konflik di dalam negeri, dan adanya kelompok-kelompok ekstrim/radikal/separatis dapat menimbulkan ancaman keamanan dan menurunkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Perubahan kebijakan domestik juga dapat berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri.

Selain itu, meskipun terdapat peningkatan presensi dan peran Indonesia di berbagai forum bilateral dan internasional, Indonesia belum melakukan engagement komunikasi global secara optimal guna menyampaikan narasi kebijakan luar negerinya.

I.2.3 Analisis SWOT

Berbagai potensi dan permasalahan dimaksud perlu dipetakan dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) Direktorat Diplomasi Publik. Dalam perencanaan kebijakan strategis, pemetaan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dapat membantu memahami keunggulan komparatif dan hal-hal yang perlu ditangani secara internal sebelum menyusun arah kebijakan luar negeri. Sementara itu (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat dimanfaatkan dan risiko eksternal yang harus diantisipasi Direktorat Diplomasi Publik dalam menjalankan kebijakan luar negeri.



Tabel I.1 Analisis SWOT

Strength		Weakness	
S1	Aset-aset diplomasi publik Indonesia sebagai <i>soft power diplomacy</i> yang diakui oleh dunia internasional	W1	Belum memadainya regulasi nasional terkait diplomasi <i>soft power</i>
S2	Berbagai kegiatan diplomasi publik dapat menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan nasional	W2	Kurangnya ketersediaan SDM Dit. Diplk baik dari segi jumlah maupun kualifikasi di bidang tertentu
S3	Jangkauan program diplomasi publik yang luas mencakup ke berbagai stakeholders (misalnya <i>public lecture</i> , pelayanan publik, dll)	W3	Prasarana yang belum menunjang khususnya pada aspek perlengkapan dan teknologi informasi
S4	Semakin kuatnya koordinasi antara Dit. Diplk dengan mitra kerja dan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan berbagai kegiatan	W4	Kegiatan bersifat rutin, sporadis dan munculnya banyak kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya (<i>pop-up events</i>)
S5	Disusunnya <i>Grand Strategy Diplomasi Soft Power</i> Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan diplomasi <i>soft power</i> yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor di bawah penjurur Kementerian Luar Negeri		
Opportunities		Threats	
O1	Tingginya antusiasme para pemangku kepentingan (akademisi, tokoh agama, masyarakat madani, media, pemuda, dsb.) dalam mendukung diplomasi publik	T1	Belum adanya persepsi yang sama mengenai pentingnya aset-aset diplomasi publik sebagai <i>soft power diplomacy</i> diantara K/L
O2	Adanya pengakuan dunia terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia yang ditunjukkan dengan tingginya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan diplomasi publik seperti BSBI, Dialog Lintas Agama, kunjungan ke Museum KAA, <i>public lecture</i> ,	T2	Meningkatnya jumlah disinformasi (<i>hoax</i>) dalam penyebaran informasi dan ancaman keamanan siber



	dan <i>diplomatic tour</i>		
O3	Terdapat upaya peningkatan peran kekoordinatoran Kemlu c.q. Dit. DipliK dalam diplomasi <i>soft power</i> melalui penyusunan <i>Grand Design Diplomasi Soft Power</i> Indonesia	T3	Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil diplomasi
		T4	Perubahan kebijakan domestik yang dapat berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri

Modalitas Dit. DipliK dan Indonesia dalam Menjalankan Polugri

Dari analisis di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia dan Dit. DipliK memiliki berbagai modalitas untuk menjalankan polugri strategis. Indonesia memiliki situasi politik dan ekonomi domestik yang kondusif untuk menjalankan kebijakan luar negeri, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi stabil dan didukung dengan kelimpahan SDA serta SDM. Indonesia juga memiliki multi-identitas yang memampukannya untuk menjadi representasi di forum internasional maupun bermitra dengan negara-negara serupa; yaitu negara berkembang, negara kepulauan/maritim, negara demokrasi ketiga terbesar dengan populasi muslim terbesar di dunia. Konsistensi Indonesia dengan prinsip bebas aktif dan rekam jejak positif dalam isu perdamaian dan antikolonialisme juga menjadi kredibilitas Indonesia sebagai *reliable partner* dalam pembangunan. Modalitas dimaksud dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai potensi yang telah dipetakan saat ini, antara lain mitra pembangunan, *soft power*, peran diaspora, serta peran strategis di kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik.

Dit. DipliK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kepentingan pemerintah Indonesia. Melalui tugasnya untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri, Dit. DipliK dapat menggunakan berbagai kegiatan diplomasi publik untuk menyuarakan kepentingan nasional dengan jangkauan program yang luas kepada berbagai *stakeholders* domestik maupun internasional. Sebagai contoh, tingginya minat peserta Beasiswa Seni dan Budaya yang terus meningkat, serta semakin berkembangnya mitra Dialog Lintas Agama Indonesia. Melalui *Grand Strategy Diplomasi Soft Power* Indonesia yang telah disusun diharapkan dapat menjadi *guideline* dalam pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan instansi/lembaga, *private*, dan asosiasi.



Peran strategis dan kredibilitas ini memungkinkan Dit. Diplk untuk mendukung pembangunan kepercayaan publik dan dukungan terhadap kebijakan luar negeri, seiring dengan meningkatnya minat pemuda dan *stakeholder* terhadap isu-isu luar negeri yang selama ini dinilai jauh dari kebijakan domestik. Hal ini salah satunya terindikasikan dari peningkatan animo publik terhadap penyelenggaraan kuliah umum dan sosialisasi dari tahun ke tahun.

Mengelola Kelemahan, Tantangan, dan Risiko ke Depan

Terlepas dari berbagai modalitas dimaksud, masih terdapat isu seperti ketegangan politik, konflik di dalam negeri, dan adanya kelompok-kelompok ekstrim/radikal/separatis dapat menimbulkan ancaman keamanan dan menurunkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Perubahan kebijakan domestik juga dapat berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri. Selain itu, meskipun memiliki peran meningkat di forum internasional dan presensi menguat dalam hubungan bilateral, Indonesia belum melakukan *engagement* komunikasi global secara optimal guna menyampaikan narasi kebijakan luar negerinya.

Pelaksanaan diplomasi *soft power* juga tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, partisipasi K/L terkait, asosiasi, profesional, hingga individu juga terlibat yang menyebabkan belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama terhadap prosedur pelaksanaan diplomasi *soft power*. Selain itu, sarana dan prasarana serta SDM yang belum menunjang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan diplomasi. Padahal, saat ini mulai terdapat tren pengerahan misi diplomatik menggunakan teknologi komunikasi yang semakin berkembang.

Kelemahan dan tantangan yang dihadapi Dit. Diplk berisiko menghambat optimalisasi pelaksanaan polugri dalam mencapai kepentingan nasional, apabila tidak dikelola secara tepat dan sistematis. Apalagi, dalam dunia yang semakin kompleks, Dit. Diplk dituntut untuk memperkuat kapasitas mitigasi terhadap berbagai risiko eksternal yang semakin dinamis dan bersifat nontradisional. Untuk itu, Dit. Diplk perlu memastikan bahwa dukungan pemangku kepentingan domestik dan postur diplomasinya kondusif dan memadai guna menjalankan kegiatan-kegiatan promosi yang dapat menunjang tercapainya kepentingan nasional.

I.3 Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Diplomasi Publik 2020 – 2024

Dalam periode 5 (lima) tahun ke belakang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 memandatkan Dit. Diplk untuk menjadi penjuror penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan diplomasi publik. Dalam pelaksanaannya, Dit. Diplk telah berhasil



mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri melalui promosi aset-aset diplomasi *soft power* Indonesia.

Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional

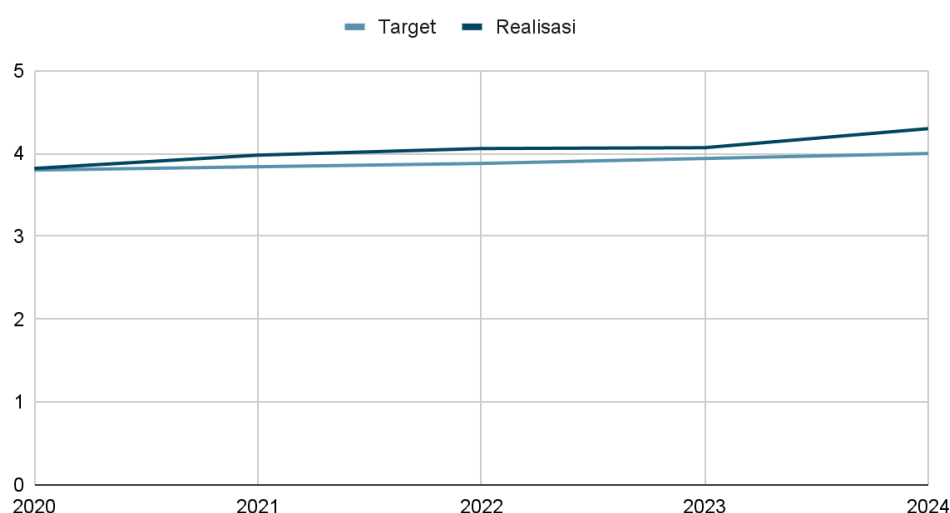
Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional diukur melalui indikator Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional yang memiliki target sebagai berikut:

Tabel I.2 Realisasi Indikator Indeks Citra Indonesia Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,85	3,90	3,95	4,07
Realisasi	3,82	3,98	4,06	4,07	4,30

Dapat diartikan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan citra positifnya melalui penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya. Hal ini dibuktikan juga dengan aspirasi sejumlah *think tank*, seperti *Lowy Institute* yang menyebutkan Indonesia sebagai “*middle power in Asia*” dengan *diplomatic influence* dan *comprehensive power* yang terus meningkat, dan diplomasi Indonesia yang berpengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada tahun tahun 2023. Selain itu, *International Chatham House* juga menyebut Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia.

Gambar I.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2020-2024



Indeks Citra sendiri merupakan Indikator Kinerja yang digunakan Kemenlu sejak 2017, mengacu pada model '*Nation Branding*' Simon Anholt yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Indeks ini diperoleh melalui hasil survei menggunakan kuesioner dengan Skala Likert 5, terdiri dari 3 dimensi, yakni Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya, Dimensi Ekonomi serta Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum. Survei tersebut dilaksanakan baik secara daring maupun luring oleh 128 Perwakilan RI di luar negeri (tidak termasuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk organisasi internasional), yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara wilayah kerja masing-masing.

Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat

Pelaksanaan kegiatan promosi dibagi menjadi dua kategori, yaitu promosi yang melibatkan konstituen internasional dan promosi yang melibatkan konstituen domestik. Dalam pelaksanaannya selama 5 (lima) tahun, terdapat beberapa *highlight* capaian program Dit. Diplk dan 4 (empat) inisiatif baru, yaitu:

- **Bali Democracy Forum**

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan platform dialog untuk memperkuat demokrasi inklusif melalui *sharing experiences* dan *best practices*. Pada periode 2020–2024, BDF diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022, secara *hybrid* di tengah tantangan pandemi COVID-19, mencerminkan adaptabilitas dan kesinambungan peran BDF dalam menggemakan nilai demokrasi dan inklusivitas. Penyelenggaraan BDF didukung oleh 3 (tiga) pilar, yaitu *Bali Civil Society and Media Forum* (BCSMF), *Bali Democracy Students Conference* (BDSC), dan *Economic Panel* (EP), yang melibatkan partisipasi multistakeholders, yakni pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, pemuda, dan sektor ekonomi.

Sesuai mandat hasil BDF ke-15, sejak 2022 penyelenggaraan BDF ditetapkan berlangsung dua tahunan. Sejalan dengan mandat tersebut, BDF ke-16 direncanakan diselenggarakan secara paralel dengan BCSMF ke-7 pada 2024. Namun, seiring perubahan prioritas pemerintahan baru, pelaksanaannya ditunda.



Gambar I.2 Bali Democracy Forum ke-15



Untuk tetap menggemakan nilai dan prinsip BDF, Indonesia juga berperan aktif dalam sejumlah forum demokrasi internasional, antara lain *Wilton Park Retreat 'Summit for Democracy – The Future: How to Sustain International Support'*, *Wilton Park Dialogue on 'Democratic Governance: Shaping Future International Cooperation and Partnerships'*, *Swiss Democracy Retreat*, serta Konferensi Internasional *'Deliberative Democracy and Constitutional Amendment'*, juga gemakan aksi kolektif untuk isu Palestina.

- ***Diplomatic Tour***

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020, kegiatan *Diplomatic Tour* ditujukan ke Bali sebagai upaya persiapan pembukaan kembali pariwisata Bali. Adapun pada tahun 2021 – 2024, telah dilaksanakan 17 kali *Diplomatic Tour* ke Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.



- **Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia**

Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pertama kalinya diselenggarakan secara virtual pada tahun 2021 sebagai upaya solutif Dit. Dipluk untuk tetap melakukan promosi seni dan budaya di masa pandemi. Selain itu, pada tahun 2024, BSBI *Refresh Program* diadakan untuk melibatkan kembali alumni BSBI dan memperkuat peran mereka sebagai *Friends of Indonesia* dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia. Hingga tahun 2024, alumni BSBI telah mencapai 1069 alumni yang tersebar di 84 negara.

Gambar I.3 Indonesia Channel 2023



- **Dialog Lintas Agama**

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan minat negara mitra untuk menyelenggarakan Dialog Lintas Agama (DLA) dengan Indonesia. Sepanjang tahun 2020-2024, Indonesia telah menyelenggarakan DLA dengan Vatikan, Austria, Polandia, dan Belanda. Dialog Lintas Agama (DLA) berhasil menjadi sebuah program *beyond conference*, dimana kerja sama antara negara mitra dalam pembangunan moderasi turun ke akar, yang merupakan hasil nyata dan bermanfaat dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara mitra.

Gambar I.4 The 8th Indonesia-Austria Interfaith and Intercultural Dialogue 2024



- **Sosialisasi dan Diseminasi Informasi**

Sosialisasi dan diseminasi informasi kepada publik domestik maupun internasional diselenggarakan secara langsung maupun virtual. Kegiatan diselenggarakan dalam bentuk kuliah umum ataupun *talkshow* untuk membumikan capaian diplomasi Indonesia serta posisi Indonesia terhadap suatu isu. Pada tahun 2020, Dit. Diplk menyelenggarakan *Pejambon Talks* dalam memberikan informasi kepada publik terkait isu kedaulatan. Pada tahun 2021 juga, webinar bertajuk “Mengapa Indonesia Mendukung Perjuangan Palestina” diselenggarakan sebagai edukasi kepada publik untuk membentuk pemahaman yang tepat atas isu Palestina serta menumbuhkan dukungan publik untuk mendukung perjuangan Bangsa Palestina. Menariknya, webinar ini dihadiri oleh 2400 peserta secara daring.

- **Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri**

Dalam mendukung peningkatan partisipasi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN), Dit. Diplk telah melakukan sejumlah kegiatan, seperti penerbitan Kartu MILN yang hingga Desember 2024 telah terbit sebanyak 2188 kartu untuk diaspora Indonesia di seluruh dunia. Terdapat juga sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani yaitu:

- (i) PKS antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan tentang Pemanfaatan KMILN dalam Rangka Penerbitan Diaspora Bonds, Januari 2020
- (ii) PKS antara Kementerian Luar Negeri dengan Bank BNI dan Mandiri terkait Pemanfaatan KMILN, Agustus 2025

Gambar I.5 Penandatanganan PKS Kemlu – Bank BNI dan Mandiri



- **Indonesia Gastrodiplomacy Series**

Indonesia *Gastrodiplomacy Series* (IGS) merupakan inisiatif baru Dit. Diplk dalam menduniakan makanan Indonesia, mempromosikan kuliner sebagai aset diplomasi *soft power*, dan membuka peluang pasar bagi masuknya produk rempah dan kuliner Indonesia ke mancanegara. Sejak diselenggarakan pada akhir tahun 2023, IGS telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- (i) Indonesia *Gastrodiplomacy Series: Diplomatic Gathering and Cooking Class for Female Heads of Missions*, 2 Desember 2023
- (ii) Indonesia *Gastrodiplomacy Series: Gala Dinner: From Borobudur to the World*, 13 Desember 2023
- (iii) Indonesia *Gastrodiplomacy Series: Diplomatic Tour – Trail of Spices in East Nusa Tenggara*, 27 – 30 Juni 2024

Gambar I.6 Kegiatan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2023-2024



- **Emerging Designer Bootcamp**

Emerging Designers Bootcamp (EDB) bertujuan mendukung perkembangan industri kreatif, khususnya di bidang mode atau wastra. Program EDB seri pertama diselenggarakan dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-75 RI-Australia. Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yogyakarta, dan *Victoria State Government* (Australia). Program EDB mendatangkan 3 (tiga) desainer Australia untuk menjalani residensi di Yogyakarta untuk mengikuti *workshops* budaya termasuk mempelajari cara membatik yang berkelanjutan dan menggabungkan desain modern dengan budaya tradisional. Acara puncak EDB berupa *showcase* hasil karya peserta EDB di *Jogja Fashion Week* (JFW), 22–25 Agustus 2024.



- **Movie Dialogue**

Bertemakan “Optimalisasi Strategi Promosi Film sebagai Aset Soft Power Diplomasi Indonesia”, pada 13 Desember 2024 Direktorat Diplomasi Publik menginisiasi kegiatan baru dalam rangka merancang strategi promosi film Indonesia yang efektif ke kancah internasional. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara K/L teknis terkait dan pelaku industri film Indonesia dengan Perwakilan RI, sebagai upaya dalam promosi, penetrasi pasar, kolaborasi industri film Indonesia dengan luar negeri, serta partisipasi film Indonesia di festival dan penghargaan film internasional.

- **Harmony for the Pacific**

Harmony for the Pacific: Connecting Indonesia and the Pacific through Culture and Shared Heritage merupakan *integrated event* antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar RI di Suva (KBRI Suva) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk memaksimalkan gaung diplomasi kedaulatan Indonesia di Kawasan Pasifik, telah diselenggarakan di Suva, Fiji, pada 23 - 27 September 2024. Kegiatan ini merupakan sebuah inisiatif baru misi diplomasi budaya yang juga merupakan bagian dari upaya diplomasi publik yang bertujuan untuk mendukung diplomasi kedaulatan di kawasan Pasifik melalui jalur sosial budaya.

Gambar I.7 *Harmony for the Pacific*, 2024



- **Dialogue on Democracy in Inclusive Society**

Dialogue on Democracy and Inclusive Society (DDIS) merupakan inisiatif Direktorat Diplomasi Publik pada 2024 sebagai wadah dialog, pertukaran gagasan, dan kerja sama kolaboratif dalam menyikapi tantangan pelaksanaan demokrasi. DDIS juga menggemakan nilai dan prinsip *Bali Democracy Forum* serta aset *soft power* Indonesia terkait pluralisme, inklusivitas, dan demokrasi dalam kerangka kerja sama bilateral dengan negara mitra. DDIS perdana dilaksanakan bersama Bangladesh dan Nepal, melibatkan *multistakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media, dengan fokus isu tata kelola pemerintahan, pemenuhan hak masyarakat di ruang publik, penguatan *homegrown democracy*, peningkatan *trust*, serta upaya memastikan demokrasi memberikan manfaat nyata bagi kepentingan rakyat (*democracy delivers*).

Gambar I.8 DDIS Indonesia – Bangladesh, 2024



- **Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia**

Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia merupakan platform interaktif menampilkan visualisasi data dan informasi terkait restoran, produk rempah dan bumbu Indonesia di luar negeri berdasarkan olah hasil survei yang dilakukan oleh Kemlu pada bulan Maret hingga Mei 2024 bekerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri. *Dashboard* diharapkan dapat menjadi acuan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri dalam mengembangkan strategi gastrodiplomasi yang efektif. Dashboard juga merupakan *living and interactive platform* yang akan terus disempurnakan dan lengkapi data-datanya melalui kerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri dan pemangku kepentingan di bidang kuliner.



Gambar I.9 Peluncuran *Dashboard* Gastrodiplomasi Indonesia



- ***Pelayanan Publik Museum KAA***

Dalam upaya pelestarian, pengembangan dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang menjadi salah satu tonggak penting dalam capaian politik luar negeri Indonesia, Dit. Diplik melalui Museum Konferensi Asia-Afrika (MKAA) menyediakan sejumlah pelayanan publik dan beragam program publik bagi pengunjung domestik dan internasional, termasuk akses ke arsip KAA.

Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP), MKAA melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan mandat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil SKM diukur sebagai Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Museum KAA, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sejak 2023.

Gambar I.10 Piagam Penghargaan Anugrah



Sejak tahun 2023, MKAA berhasil memperoleh nilai A dalam mutu pelayanan, yang setara dengan nilai sangat baik dalam kinerja unit pelayanan, dan nilai 4 dari persepsi kepuasan berskala 4. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diterima dari MKAA.

Apresiasi atas layanan publik MKAA juga dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang diterima MKAA. Pada tahun 2018, MKAA memperoleh Akreditasi A dari Kemendikbudristek. Pada tahun 2019, MKAA meraih predikat Zona Integritas



Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Pada tahun 2022, MKAA dinobatkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2024, MKAA kembali memperoleh penghargaan untuk kategori Museum Bersahabat. Dalam rentang satu dekade, MKAA telah menerima empat kali penghargaan IMA.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

II.1 Visi

Selaras dengan visi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Diplomasi Publik sebagai Unit Kerja Eselon II yang menyelenggarakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri memiliki visi dalam periode 2025 – 2029, yaitu:

“Menjadi Penjuru Penguatan Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Diplomasi Publik guna Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”

II.2 Misi Unit Organisasi

Sebagai upaya mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Diplomasi Publik menetapkan tiga misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 – 2029, sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan promosi aset-aset diplomasi soft power Indonesia;**
- b. **Meningkatkan dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset *soft power* Indonesia;**
- c. **Meningkatkan citra positif dan pengaruh Indonesia di dunia internasional melalui keikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan diplomasi publik.**

II.3 Tujuan Unit Organisasi

Misi Direktorat Diplomasi Publik selanjutnya dijabarkan dalam tujuan Direktorat dengan penetapan Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan, sebagai berikut:

- a. **Mengoptimalkan diplomasi soft power Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional**
- b. **Terwujudnya diplomasi publik yang memperkuat citra positif Indonesia**



II.4 Sasaran Strategis Unit Organisasi

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenlu 2025-2029, dan Renstra Ditjen IDP 2025-2029, Direktorat Diplomasi Publik memiliki 1 (satu) Rincian Output Prioritas Nasional (ROPN), yaitu Penyusunan Strategi Kebijakan Pengembangan Aset *Soft Power*.

Pada Renstra 2025-2029, Dit. Diplk memiliki 5 (lima) sasaran strategis untuk dicapai. Uraian di bawah ini menggambarkan sasaran strategis Dit. Diplk dimaksud, beserta indeks yang digunakan.

1. Promosi Aset Diplomasi *Soft Power* yang Meningkatkan

Promosi merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menginformasikan, menyebarluaskan, memengaruhi, menawarkan, mengajak, dan melibatkan konstituen internasional dan domestik yang diselenggarakan guna mendukung dan menunjukan level peran Indonesia yang berpengaruh dalam dunia internasional.

Aset Diplomasi *Soft Power* merupakan modal, sumber daya, atau kekayaan yang Indonesia miliki sebagai instrumen diplomasi soft power. Aset tersebut dapat dikategorisasi ke dalam empat klaster, yaitu:

- 1) Klaster Politik dan Nilai-Nilai Kebangsaan (ie., Pancasila, Promosi Perdamaian, Demokrasi, HAM, Kebhinekaan, Islam Moderat, dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan);
- 2) Kaster Ekonomi dan Pariwisata (ie., Destinasi pariwisata, Ekonomi Kreatif);
- 3) Klaster Sosial Budaya (ie., Kekayaan Tradisi, Bahasa, Film, Musik, Seni Rupa, Olahraga); dan
- 4) Klaster Pendidikan, Riset, dan Inovasi (ie., Beasiswa, Kekayaan Intelektual).

Arti kata **meningkat** mencerminkan bertambah banyak.

Pengukuran menggunakan dua Indikator, yaitu:

- a. Persentase Promosi Aset Diplomasi *Soft Power* yang telah Diselenggarakan
- b. Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Aset *Soft Power* yang Diajukan



2. Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat

Promosi merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menginformasikan, menyebarluaskan, memengaruhi, menawarkan, mengajak, dan melibatkan konstituen internasional dan domestik yang diselenggarakan guna mendukung dan menunjukan level peran Indonesia yang berpengaruh dalam dunia internasional.

Aset Diplomasi Publik adalah nilai-nilai dan potensi Indonesia yang diproyeksikan untuk win the heart and mind sasaran target. Contoh Aset Diplomasi Publik adalah nilai Bhinneka Tunggal Ika, moderasi beragama Indonesia, demokrasi, potensi ekonomi, potensi generasi muda Indonesia.

Arti kata **meningkat** adalah beralih pada keadaan yang menjadi lebih baik.

Pengukuran menggunakan Indikator Persentase Promosi Aset Diplomasi Publik yang Melibatkan Konstituen Domestik yang telah Diselenggarakan.

3. Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika yang Prima

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Museum Konperensi Asia-Afrika merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen IDP Kementerian Luar Negeri, yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pengembangan dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia-Afrika serta menyelenggarakan fungsi sesuai mandat Kepmenlu No. 02/A/OT/VIII/2003/01.

Arti kata **prima** mencerminkan sangat baik atau utama.

Pengukuran pelayanan menggunakan Indikator Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika dengan



target 4 dari tahun 2025 hingga 2029. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan tingkat kepuasan publik atas kualitas pelayanan publik Museum Konferensi Asia-Afrika melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pengunjung Museum. Nilai ini menggunakan skala 1 hingga 4.

Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalui pengisian kuesioner oleh responden terkait sembilan aspek pelayanan publik yang disediakan oleh MKAA. Data survei diolah menggunakan skala likert menjadi indeks yang dikonversi menjadi nilai persepsi.

4. Tata Kelola organisasi di Direktorat Diplomasi Publik yang Baik

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Arti kata **baik** mencerminkan elok; patut; teratur.

Pengukuran menggunakan Indikator Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Diplomasi Publik dengan **target 79,6 pada tahun 2025 dan 82,5 pada tahun 2029**. Penilaian ini merupakan evaluasi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).

5. Pengelolaan Anggaran Direktorat Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel



Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan.

Optimal berarti paling baik dan tertinggi.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran menggunakan Indikator Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Diplomasi Publik.

Tabel II.1 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Direktorat Diplomasi Publik 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategi	Indikasi Risiko
1	Promosi Aset Diplomasi <i>Soft Power</i> yang Meningkatkan	1. Belum memadainya regulasi nasional terkait diplomasi <i>soft power</i>. 2. Belum adanya persepsi yang sama mengenai pentingnya aset-aset diplomasi publik sebagai <i>soft power diplomacy</i> diantara K/L. 3. Perubahan kebijakan domestik yang dapat berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri. 4. Pemberitaan negatif terhadap situasi domestik dan kebijakan luar negeri RI oleh media internasional.
2	Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkatkan	1. Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil diplomasi. 2. Berkurangnya dukungan publik domestik terhadap kebijakan luar negeri RI
3	Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika yang Prima	1. Dasar hukum UPT MKAA belum dimutakhirkan, sehingga berdampak pada pengelolaan MKAA dalam memberikan pelayanan prima.



		2. Kompetensi Sumber Daya Manusia di MKAA belum sesuai ketentuan, sehingga berdampak pada kapasitas dan kualitas pemberian layanan publik. 3. Sarana Prasarana MKAA belum inklusif dan belum sesuai perkembangan teknologi informasi, sehingga menghambat akses dan pelayanan publik secara optimal bagi kelompok rentan. 4. Status kepemilikan MKAA belum diperjelas, sehingga berdampak pada hambatan pemeliharaan gedung dan pengembangan sarpras yang sesuai ketentuan. 5. Anggaran MKAA sangat terbatas sehingga menghambat kemampuan MKAA dalam mengembangkan database koleksi dengan bantuan tenaga ahli atau menyusun program publik yang memerlukan jasa pihak ketiga.
4	Tata Kelola organisasi di Direktorat Diplomasi Publik yang Baik	1. Belum tersusunnya LKj Direktorat Diplomasi Publik secara tepat waktu. 2. Belum selarasnya dokumen perencanaan Direktorat Diplomasi Publik dan pengukurannya.
5	Pengelolaan Anggaran Direktorat Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel	1. Belum terealisasinya penggunaan anggaran Direktorat Diplomasi Publik secara optima dan akuntabel akibat penyesuaian regulasi. 2. Munculnya banyak kegiatan yang belum direncanakan sebelumnya (<i>pop-up events</i>) menyebabkan perencanaan dan pengelolaan anggaran belum optimal.



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam periode 2025–2029, Direktorat Diplomasi Publik menetapkan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan Renstra Kementerian Luar Negeri, Renstra Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, serta Peta Jalan *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia guna memperkuat citra positif, pengaruh, dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global.

Peta Jalan *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* diarahkan untuk menindaklanjuti dokumen GSDSP melalui tahapan yang jelas dan progresif. Periode 2025–2026 difokuskan pada penguatan fondasi: penyusunan GSDSP, pembentukan Pokja lintas K/L, pemetaan aset *soft power* dan Kekayaan Intelektual (KI), serta penetapan narasi Indonesia Emas 2045 sebagai *brand* induk nasional. Fase ini memastikan bahwa seluruh ekosistem diplomasi *soft power* memiliki kerangka kerja, data awal, serta garis koordinasi yang sama sebelum memasuki tahap implementasi. Selanjutnya, tahun 2027 diarahkan pada penyempurnaan *enabling conditions* yang juga menjadi fokus Bappenas, meliputi regulasi, pendanaan, tata kelola SDM, dan harmonisasi lintas sektor. *Baseline* Survei Citra Indonesia pun mulai dilakukan sebagai instrumen evaluasi nasional untuk mengukur progres secara objektif.

Memasuki 2028–2029, peta jalan GSDSP bergerak ke fase ekspansi dan implementasi global yang sepenuhnya paralel dengan kerangka penguatan aset unggulan Bappenas. Fokusnya mencakup komersialisasi internasional aset KI, diplomasi budaya kontemporer, penguatan pusat-pusat Indonesianis, serta penetrasi Indonesia di negara prioritas. Pada fase ini, GSDSP juga memanfaatkan momentum strategis, seperti DK PBB, WHO, dan D8, untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan suara utama *Global South*. Seluruh langkah tersebut dirancang untuk memperluas jangkauan narasi Indonesia sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi kreatif, inovasi, dan budaya.

III.1.1. Arah Kebijakan Direktorat Diplomasi Publik

Pada Renstra 2025-2029 ini, Direktorat Diplomasi mengadopsi arah kebijakan yang relevan dengan visi dan misi sesuai dengan Renstra 2025-2029 Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, yaitu:

- a. **Penguatan pengelolaan informasi dan diplomasi publik yang terintegrasi, responsif, dan berbasis data**



untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia serta memperkuat citra positif Indonesia di tingkat global.

- b. **Peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal IDP yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan**, khususnya masyarakat, media, mitra internasional, dan diaspora Indonesia.
- c. **Optimalisasi pemanfaatan aset diplomasi *soft power* Indonesia** melalui narasi strategis yang konsisten, kreatif, dan adaptif terhadap dinamika global serta karakteristik audiens internasional.

III.1.2. Strategi Direktorat Diplomasi Publik

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan dimaksud, Direktorat Diplomasi Publik menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Diplomasi *Soft Power*;
- b. Meningkatkan kerja sama strategis antara Direktorat Diplomasi Publik dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan promosi aset *soft power* Indonesia;
- c. Meningkatkan peran dan kontribusi Direktorat Diplomasi Publik di forum-forum demokrasi guna memperkuat dialog, serta meningkatkan legitimasi dan reputasi Indonesia dalam isu-isu demokrasi;
- d. Mengoptimalkan *Public Diplomacy Channel*, antara lain melalui *side event* dalam Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2029–2030 dan kegiatan tematik lainnya, guna meningkatkan *awareness* dan dukungan publik internasional terhadap posisi Indonesia;
- e. Mengembangkan dan memperluas jaringan alumni untuk memperkuat diplomasi publik melalui kegiatan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI);
- f. Menginisiasikan program pertukaran dan dialog regional antar pemuda bersama mitra Organisasi Masyarakat Madani sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam diplomasi *soft power* Indonesia;
- g. Mendorong diplomasi kebudayaan, antara lain dengan memperkuat promosi seni dan tradisi Indonesia, pemuda, dan olahraga di berbagai forum regional dan internasional serta melalui kerja sama kebudayaan dengan mitra;
- h. Mendukung pengembangan industri kuliner Indonesia melalui koordinasi dan sinergi lintas K/L dalam berbagai program fasilitasi dan bantuan



Pemerintah kepada pelaku usaha kuliner di luar negeri, dan pengembangan *Dashboard* Gastrodiplomasi;

- i. Meningkatkan kualitas pelayanan di Museum Konferensi Asia-Afrika.

Mitigasi Risiko

Berdasarkan arah kebijakan luar negeri dimaksud, dipetakan risiko yang perlu dimitigasi dengan mempertimbangkan analisis SWOT Direktorat Diplomasi Publik.

Tabel III.1 Matriks Mitigasi Risiko

Risiko Politik	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Situasi Politik dalam Negeri di Indonesia sehingga mempengaruhi Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	Tinggi	Tinggi	Tidak tercapainya Indeks Citra Positif Indonesia yang telah ditetapkan	Situasi Politik dalam Negeri di Indonesia sehingga mempengaruhi Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional
Situasi Politik di luar Negeri di Indonesia sehingga mempengaruhi kebijakan polugri Indonesia	Tinggi	Sedang	Kegiatan tidak terselenggara dan output tidak maksimal	- Memperkuat <i>awareness</i> terhadap kondisi politik di luar negeri - Menyiapkan rencana alternatif
Risiko Eksternal	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Pemberitaan negatif terhadap situasi domestik dan kebijakan luar negeri RI oleh media internasional	Sedang	Sedang	Terdisrupsinya opini publik tentang citra Indonesia	<i>Engagement</i> dan <i>familiarization trip</i> dengan editor dan jurnalis media asing bersama Perwakilan RI
Berkurangnya	Rendah	Besar	Resistansi	<i>Engagement</i>



dukungan publik domestik terhadap kebijakan luar negeri RI			publik, demonstrasi atas kebijakan tertentu • Peningkatan pemberitaan negatif oleh media internasional	dengan Komisi I DPR RI terkait perkembangan kebijakan luar negeri pada tiap tahun anggaran • Peningkatan upaya diplomasi publik melalui presensi di media dan juru bicara
Risiko Pemangku Kepentingan	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Antusiasme konstituen <i>Grand Strategy</i> Diplomasi <i>Soft Power</i> yang disusun oleh Dit. Diplk	Rendah	Sedang	Tidak terealisasinya berbagai potensi diplomasi <i>soft power</i> Indonesia	• Pemetaan <i>quick wins</i> dan manfaat untuk menunjukkan komitmen nyata Indonesia • <i>Engagement</i> dengan konstituen sejak awal penyusunan <i>Grand Strategy</i> guna menumbuhkan <i>sense of ownership</i>
Kurangnya sinergi dan adanya perbedaan program prioritas dari	Tinggi	Tinggi	Tidak tercapainya target program	Melakukan <i>engagement</i> dengan pemangku kepentingan untuk



masing-masing pemangku kepentingan				menynergikan program
Risiko Administratif	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Mutasi pejabat	Tinggi	Sedang	Terhambatnya efektivitas dan kesinambungan pencapaian program	- Persiapan sistem manajemen pengetahuan dan arsip diplomatik digital untuk <i>institutional knowledge</i> - Penyesuaian prosedur internal seperti rotasi terbatas (<i>buffer time</i>) dan bimbingan teknis
Risiko Anggaran	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Penurunan atau efisiensi pagu anggaran Direktorat Diplomasi Publik	Tinggi	Besar	Berkurangnya kapasitas fiskal untuk kegiatan pelaksanaan Dit. Dipli dan kemampuan untuk memenuhi target tahunan	Penyiapan <i>contingency plan</i> dengan anggaran minimal/ pasca-efisiensi sejak awal tahun anggaran, dengan skenario yang masih dapat mempertahankan target unit organisasi

Sebagai catatan, tingkat probabilitas dan dampak bersifat dinamis ataupun berubah seiring perubahan dan perkembangan situasi baik di tingkat nasional maupun global.



III.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kemenlu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Permenlu No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam periode 2025-2029, Direktorat Diplomasi Publik akan menyusun berbagai peraturan/kebijakan guna mendukung pencapaian visi misi Direktorat Diplomasi Publik.

Dapat disampaikan bahwa penyusunan kerangka regulasi yang akan dilaksanakan pada periode ke depan ada yang bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai K/L. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika dan proses penetapan peraturan tersebut.

Adapun penyusunan kerangka regulasi yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran strategis mencakup:

1. Rancangan Perpres/Inpres/Kerangka Hukum Lainnya tentang *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Diplomasi Publik periode 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam kaitannya, Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri.

Adapun Direktorat Diplomasi Publik memiliki fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis;



- d. pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri yang meliputi politik dan nilai kebangsaan, ekonomi dan pariwisata, sosial dan budaya, serta isu aktual dan strategis; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat

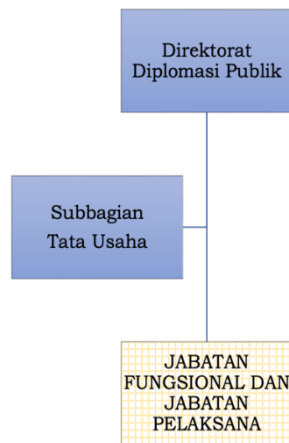
Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.02/A/OT/VIII/2003/01 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Konferensi Asia Afrika, Direktorat Diplomasi Publik membawahi satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) yang memiliki tugas melaksanakan urusan pelestarian, pengembangan, dan promosi nilai-nilai konferensi Asia Afrika.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT MKAA memiliki fungsi:

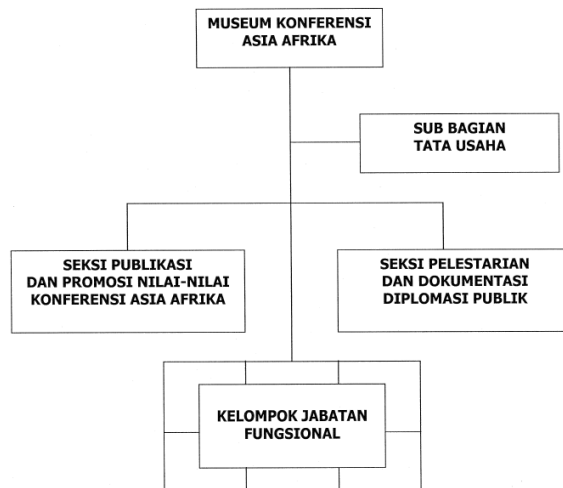
- a. pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian benda-benda/dokumen yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ilmiah, yang berkaitan dengan kegiatan diplomasi publik;
- b. pengembangan, penerbitan, dan penyebarluasan hasil penelitian atas benda-benda bersejarah, untuk kepentingan Pendidikan, informasi, dan pelestarian nilai budaya guna menggalang dukungan publik;
- c. pemberian bimbingan, penyuluhan, penyajian koleksi museum dengan pola yang bersifat mendidik dan memperluas wawasan serta pelayanan yang rekreatif kepada para pengunjung baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kegiatan diplomasi publik;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Museum KAA.



Gambar III.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Diplomasi Publik



Gambar III.2 Bagan Struktur Organisasi Museum KAA



SDM Direktorat Diplomasi Publik

Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2025 sebanyak 36 pegawai yang terdiri dari 15 pegawai pria (41,7%) dan 21 pegawai wanita (58,3%).



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Diplomasi Publik terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya dari tahun ke tahun. Target kinerja dimaksud dimuat dalam Tabel berikut:

Tabel IV.1 Target Kinerja Direktorat Diplomasi Publik 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran: Promosi Aset Diplomasi <i>Soft Power</i> yang Meningkat						
Persentase Promosi Aset Diplomasi <i>Soft Power</i> yang Telah Diselenggarakan	90%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	Persentase
Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Aset <i>Soft Power</i> yang Diajukan	1	1	1	1	1	Rekomendasi
Sasaran: Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika yang Prima						
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	Nilai
Sasaran: Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat						
Persentase Promosi Aset Diplomasi Publik yang Melibatkan Konstituen Domestik yang Telah Diselenggarakan	90%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	Persentase
Sasaran: Tata Kelola Organisasi di Direktorat Diplomasi Publik yang Baik						
Nilai evaluasi AKIP Direktorat Diplomasi Publik	79,2 (BB)	80 (BB)	81,5 (A)	82 (A)	82,5 (A)	Nilai



Sasaran: Pengelolaan Anggaran Direktorat Diplomasi Publik yang Optimal dan Akuntabel						
Persentase realisasi anggaran Direktorat Diplomasi Publik	99%	99%	99%	99%	99%	Persentase

IV.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu didukung dengan berbagai sumber daya baik dukungan sumber daya manusia, prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan. Berkaitan dengan dukungan pendanaan, proyeksi indikasi kebutuhan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sampai dengan tahun 2029 terdapat dalam Tabel.

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Diplomasi Publik 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Diplomasi Publik					
Promosi Aset Diplomasi <i>Soft Power</i> yang Meningkat	28.942.340	17.685.113	33.474.923	39.500.410	46.610.482
Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat	8.910.538	4.601.146	9.181.047	10.886.009	12.903.100
Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia-Afrika yang Prima	551.585	413.225	782.164	922.955	1.089.086
Kebijakan Pengembangan Aset <i>Soft Power</i>	90.740	318.329	350.162	385.178	423.696



BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2025, Direktorat Diplomasi Publik memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup diplomasi publik di dalam dan luar negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Diplomasi Publik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Diplomasi Publik guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam penguatan Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi.

Renstra ini juga menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Renstra ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebijakan nasional, serta arahan pimpinan.

Untuk periode 2025-2029, Direktorat Diplomasi Publik senantiasa berupaya untuk meningkatkan citra positif Indonesia di dunia melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Selain itu, melalui *Grand Strategy Diplomasi Soft Power* yang disusun, diharapkan pelaksanaan diplomasi *soft power* Indonesia dapat lebih terarah dan bersinergi antar pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri.





LAMPIRAN

Lampiran I

Matriks Strategi Direktorat Diplomasi Publik Tahun 2026-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN DITJEN IDP	NO	STRATEGI DITJEN IDP	NO	STRATEGI DIREKTORAT DIPLOMASI PUBLIK
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal IDP yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan	1	Penguatan diplomasi publik dan promosi aset <i>soft power</i> Indonesia	1	a. Mengoptimalkan peran <i>Grand Strategy</i> Diplomasi <i>Soft Power</i> Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Diplomasi <i>Soft Power</i>; b. Meningkatkan kerja sama strategis antara Direktorat Diplomasi Publik dengan actor pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan promosi aset <i>soft power</i> Indonesia; c. Meningkatkan peran dan kontribusi Direktorat Diplomasi Publik di forum-forum demokrasi guna memperkuat dialog, serta meningkatkan legitimasi dan reputasi Indonesia dalam isu-isu demokrasi;



					d. Mengoptimalkan <i>Public Diplomacy Channel</i>, antara lain melalui <i>Side Event</i> dalam Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2029–2030 dan kegiatan tematik lainnya, guna meningkatkan awareness dan dukungan publik internasional terhadap posisi Indonesia; e. Mengembangkan dan memperluas jaringan alumni untuk memperkuat diplomasi publik melalui kegiatan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI); f. Menginisiasikan program pertukaran dan dialog regional antar pemuda bersama mitra Organisasi Masyarakat Madani sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam diplomasi <i>soft power</i> Indonesia;
--	--	--	--	--	--

					g. Mendorong diplomasi kebudayaan, antara lain dengan memperkuat promosi seni dan tradisi Indonesia, pemuda, dan olah raga di berbagai forum regional dan internasional serta melalui kerja sama kebudayaan dengan mitra; h. Mendukung pengembangan industri kuliner Indonesia melalui koordinasi dan sinergi lintas K/L dalam berbagai program fasilitasi dan bantuan Pemerintah kepada pelaku usaha kuliner di luar negeri, dan pengembangan <i>Dashboard</i> Gastrodiplomasi;
2	Optimalisasi pemanfaatan aset diplomasi soft power Indonesia	2	Peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal IDP	2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Museum Konferensi Asia-Afrika



Lampiran II

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Diplomasi Publik Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator/ KRO/RO	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan: Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang Meningkat							28.942.340	17.685.113	33.474.923	39.500.410	46.610.482
		Persentase Promosi Aset Diplomasi Soft Power yang telah Diselenggarakan	90%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%					
		Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Aset Soft Power yang Diajukan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi					
	Promosi Aset Diplomasi Publik yang Meningkat											
		Persentase Promosi Aset Diplomasi Publik yang Melibatkan Konstituen Domestik yang telah Diselenggarakan	90%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%					



	Pelayanan Publik Ditjen IDP yang Prima										
		Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik Museum Konperensi Asia Afrika	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)				
	Tata Kelola Organisasi di Direktorat Diplomasi Publik yang Baik										
		Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Diplomasi Publik	79,20 (BB)	80 (BB)	81,5 (A)	82 (A)	(82,5 (A)				
	Pengelolaan anggaran Direktorat Diplomasi Publik yang optimal dan akuntabel										
		Persentase realisasi anggaran Direktorat Diplomasi Publik	99%	99%	99%	99%	99%				
		KRO 6026.AEH Promosi									
		RO 6026.AEH.001 Promosi Aset Diplomasi	42 Promosi	42 Promosi	42 Promosi	42 Promosi	42 Promosi	8.910.538	4.601.146	9.181.047	10.886.009



		kepada Konstituen Internasional										
		RO 6026.AEH.002 Promosi Aset Diplomasi kepada Konstituen Domestik	14 Promosi	14 Promosi	14 Promosi	14 Promosi	15 Promosi	551.585	413.225	782.164	922.955	1.089.086
		RO 6026.AEH.003 Pelayanan Publik MKAA sebagai Promosi Diplomasi Publik RI	12 Promosi	12 Promosi	12 Promosi	13 Promosi	13 Promosi	1.500.000	1.500.000	2.839.246	3.350.310	3.953.366
		KRO 6026.PBC Kebijakan Bidang Politik										
		RO 6026.PBC.003 Penyusunan Strategi Kebijakan Pengembangan Aset Soft Power	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	90.740	318.329	350.162	385.178	423.696

